**KAJIAN PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT DALAM MENDORONG REFORMASI KEAMANAN DI PULAU TERLUAR SAMUDERA HINDIA**

***STUDIES OF SOCIAL CHANGE OF COMMUNITIES IN TERM OF URGE SECURITY REFORM IN INDIAN OCEAN REMOTE ISLANDS***

Mukti Aprian[[1]](#footnote-1)

Universitas Pertahanan

([muktikmp@gmail.com](mailto:muktikmp@gmail.com))

**Abstrak** *-* Paper ini merupakan gambaran akan konsep keamanan maritim di Indonesia, yang terfokus pada empat kajian; perubahan sosial, reformasi keamanan, konsep poros maritim dunia, dan pelibatan masyarakat kepulauan/perbatasan. Keterpisahan antara komponen-komponen tersebut merupakan suatu gambaran akan jarak teori dan praktis yang sulit dipersatukan dalam kebijakan Indonesia saat ini. Dengan adanya perubahan geopolitik di Indonesia, maka pemersatuan kebijakan tersebut terlihat masuk akal. Fokus pemerintah yang mengarah pada kemaritiman dan pembangunan masyarakat pinggiran merupakan kepentingan mendesak dalam proses otonomi daerah dan reformasi keamanan. Melalui kajian yang komprehensif dengan memanfaatkan kajian kuantitatif mengenai perilaku pemerintah dan tindakan sosial serta kajian kualitatif mengenai perubahan sosial serta dimodelkan dalam format *Soft Systems Methodology*, mendapatkan gambaran atas kebijakan keamanan maritim yang ideal dengan dua lokasi fokus penelitian yaitu pulau Enggano dan Pulau Siberut.

**Kata Kunci**: Perubahan sosial, keamanan maritim, poros maritim dunia, pelibatan masyarakat.

***Abstract*** *- This paper provide an overview of the maritime security concept in Indonesia, which consists of four main research; social changes, security reform, world maritime nexus (Poros Maritim Dunia), and society participatory. The separation among those components is an illustration of gap between theoretical dan facts which difficult being ties in one Indonesian policy right now. With geopolitical change in Indonesia, making the policy looks realistic*. *Indonesia government which focusing on development of maritime and seaside communities has becoming an urge national interest for process of regional autonomy and security reform*. *Research with comprehensive studies using quantitative and qualitative methods that analyzing behaviors of government and actions of communities, also policy modeling using soft systems methodology has getting an ideal maritime security concept for Islands of Enggano and Siberut as two research locations.*

***Keywords:*** *Social changes, maritime security, world maritime nexus, society participatory.*

**Pendahuluan**

P

residen RI Joko Widodo pada KTT Asia Timur, di 9th East Asia Summit, Plenary Seasons, Nay Pyi Taw, Myanmar memperkenalkan paradigma poros maritim dunia sebagai jawaban atas perkembangan geopolitik dan potensi kekuatan bangsa. Poros Maritim Dunia (PMD) yang terdiri atas lima pilar yaitu Budaya Maritim, Pengelolaan Sumberdaya Alam, pembangunan Infrastruktur, Diplomasi, dan Keamanan sebagai bagian dari visi maritim kabinet kerja (metrotvnews.com, 2014, pA. 318161).

Menurut Suropati (2016) keberadaan PMD akan menjadikan Indonesia pengimbang antara kebijakan beberapa negara kuat seperti halnya Tiongkok dengan program Maritime Silk Road, Amerika Serikat dengan Freedom of Navigation, serta negara-negara menengah seperti halnya Jepang, Australia, dan India (p.3-12). Untuk menjawab tantangan geopolitik tersebut, Djalal (2016) menekankan perlunya mindset bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim (p. 1). Hal senada disampaikan pula oleh Limbong (2015) yang menekankan pada butuhnya program maritim berkelanjutan dan berbasis kultur yang terbuka egaliter, haus pengetahuan, dan menyukai perubahan (p. 230).

Isu kemaritiman pada aspek keamanan sering dikaitkan dengan lemahnya teknologi dan peralatan pendukung pertahanan. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menekankan bukan pada permasalahan penangkapan ikan namun lebih kepada hubungan internasional dan pengembangan alutsista. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa isu keamanan maritim tidak akan lepas dari masalah penyediaan alutsista (bbc.com, 2016, pA160531).

Menteri Kelautan dan Perikanan dalam evaluasi kinerja Kementerian Juli 2016 menyampaikan bahwa penyediaan sarana dan prasarana kelautan, dan masalah mental masyarakat yang masih menggunakan cara-cara tidak ramah lingkungan merupakan masalah utama (KKP, 2016, p. 1-2). Kemiskinan di masyarakat pesisir merupakan alasan yang kuat. Dalam data TNP2K (2011) jumlah masyarakat miskin di wilayah pesisir sebesar 2,13 juta rumah tangga sasaran (RTS) atau 97% dari total jumlah penduduk pesisir nasional yang mencapai 2,19 juta rumah tangga.

Munculnya kebijakan Poros Maritim Dunia (PMD) sebagai jawaban atas berbagai permasalahan negara menarik untuk dikaji. Bila melihat berbagai upaya dalam pengentasan kemiskinan banyak cara telah dijalankan. Sedangkan pengintegrasian keamanan dan kemasyarakatan dapat dilihat dengan berbagai kebijakan seperti halnya program Bina Teritorial oleh TNI AD, dan Bina desa pesisir oleh TNI AL. Namun sampai saat ini belum banyak diteliti bagaimana keterkaitan kebijakan pemerintah dalam melibatkan masyarakat dalam suatu kajian sosiologis. Makalah ini akan berangkat dari pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika Keamanan Maritim di Pulau Siberut dan Enggano?
2. Bagaimana dinamika perubahan sosial masyarakat pesisir di Pulau Siberut dan Enggano?
3. Bagaimanakah rumusan strategi pelibatan masyarakat yang disusun melalui konsep perubahan sosial dan pendekatan reformasi keamanan maritim?

**Metode Analisis**

Makalah ini dianalisis melalui pendekatan *Mix*-*method* dengan menggunakan metode *Soft System Methodology* (SSM) sebagai upaya penggabungan data. Dari metode tersebut diharapkan didapat gambaran yang komprehensif. Metode *mix-method* memiliki keunggulan dapat memperluas pembahasan dengan pencampuran kedua metode sekaligus (Creswell, 2014. p. 307). Sedangkan SSM mempermudah dalam mengambil berbagai masukkan dari pada mengidentifikasi jalan lainnya yang dirangkum dalam analisis suatu jalan pemikiran/kebijakan (Williams & Hummelbrunner, 2011, p. 242).

Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mencari keterkaitan antara faktor perubahan sosial. faktor berupa tindakan sosial masyarakat dan perilaku pemerintah merupakan gambaran atas dinamika perubahan sosial. Pengumpulan data kuantitatif didapatkan berdasarkan hasil survei angket yang diberikan pada masyarakat dan pemerintah di kedua lokasi penelitian. Selanjutnya melalui pendekatan kualitatif juga dianalisa faktor perubahan sosial lainnya seperti konflik kekuasaan, benturan ekonomi dan teknologi.

Analisis kualitatif secara total digunakan untuk mempelajari fenomena Pelibatan masyarakat dalam keamanan dan dinamika keamanan maritim. Pengumpulan data kualitatif didapatkan melalui wawancara mendalam kepada pejabat lembaga pemerintahan. Sedangkan, observasi, dan dokumentasi digunakan untuk mendapat kajian yang lebih komprehensif.

Penggabungan data kuantitatif dan kualitatif merupakan tahapan awal dalam strategi SSM yaitu kajian mengamati kondisi nyata. Data perubahan masyarakat dimaksudkan merupakan hasil analisis yang mendalam untuk melihat realitas dalam dunia sebenarnya, untuk itu penggabungan data akan lebih dominan pada analisis deskriptif dengan perspektif teoritis.

**Hasil dan Pembahasan**

**Upaya Pelibatan Masyarakat dalam Pertahanan dan Keamanan**

Pelibatan masyarakat dalam proses keamanan diatur dalam Undang-undang negara. Dalam UUD 1945 Bab XII Pasal 30 ayat 1 dan 2, pertahanan dan keamanan merupakan kewajiban setiap warga negara serta upaya pertahanan dan keamanan diatur dengan sistem rakyat semesta dengan TNI dan Kepolisian sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dalam UU no 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara dikatakan bahwa prinsip keamanan dilaksanakan berdasarkan kesemestaan, sedangkan penyelenggaraan pertahanan berdasarkan Bab III pasal 6 dilaksanakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman.

Secara nasional proses melibatkan masyarakat dalam pertahanan dan keamanan masih mengalami celah yang serius seperti yang diungkapkan oleh Laksma (Purn) Fanani Tedjokusumo yang merupakan purnawirawan kepala dinas pembinaan potensi maritim TNI AL,

“… Kegiatan pembinaan masyarakat sebelum era reformasi sarat akan kepentingan politis oknum yang berkaitan dengan pemilihan pemimpin. Bahkan dalam tingkat operasional proses pembinaan teritorial sering disalahgunakan oknum tentara untuk menindas dan memeras masyarakat. Salah satu program pembinaan teritorial dijalankan oleh TNI AL adalah Surya Baskara Jaya. Pasca 1998 upaya politisasi itu mulai dihindari, dan selanjutnya diupayakan kerjasama dengan berbagai lembaga baik milik negara maupun swasta yang berkaitan dengan pengembangan pulau-pulau terluar. Secara signifikan masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya program pembangunan dan bantuan yang dijalankan. Bahkan TNI AL dijadikan sebagai ‘idola’ dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat. (Fanani Tedjokusumo, Komunikasi personal, September 2016)”

Pada tingkatan operasional terlihat bahwa terdapat persamaan pada lembaga pertahanan namun perbedaan pada lembaga keamanan. Lembaga pertahanan yang diwakili TNI AL dan TNI AD memperlihatkan persamaan doktrin mengenai upaya pelibatan masyarakat dalam pertahanan baik di Sumatera Barat maupun di Bengkulu. Namun lembaga keamanan yang diwakili Dit Polair Polda Sumatera Barat dan Bengkulu memiliki kebijakan masing-masing. Dit Polair memiliki kesamaan dengan program pemerintahan daerah.

**Dinamika Keamanan Maritim**

Bahasan mengenai keamanan maritim dikaitkan dengan kepentingan dan kebijakan suatu negara. Keamanan maritim sendiri menurut Rahman (2009) sangat bergantung pada kepentingan suatu lembaga, atau berkaitan pula dengan bias politik dan ideologi (p. 29). Namun pasca perang dingin muncul kesamaan dalam menghadapi ancaman. Till (2004) mengatakan bahwa keamanan maritim adalah bagaimana menciptakan *‘good order at sea’* atau tertatanya laut. Hal itu karena terdapat peningkatan penggunaan kekuatan laut seiring bertambahnya kerjasama ekonomi secara internasional (p. 14).

Keamanan maritim merupakan suatu isu yang relatif baru dalam berbagai pandangan pemerintah dan masyarakat di Pulau Siberut dan Enggano. Bahkan secara luas Kementerian Pertahanan melalui Direktorat Wilayah Pertahanan mengungkapkan masih dalam bentuk yang cukup samar,

“… keamanan maritim seperti halnya terminologi keamanan yang memiliki makna menciptakan suasana aman di lingkungan sehingga dapat beraktivitas tanpa ada gangguan atau ancaman sehingga dapat berkarya tanpa rasa takut. Keamanan maritim merupakan penciptaan lingkungan laut yang aman (Dedet Hadjarati, komunikasi personal, September 2016).”

Standar keamanan sering dikaitkan dengan adanya kondisi politik dan kepentingan suatu negara, seperti halnya yang diungkapkan oleh Sekretaris Dinas Pembinaan Potensi Maritim Markas Besar TNI AL sebagai Berikut,

“.. Sesuai dengan program yang dijalankan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo yakni menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, sehingga keamanan maritim tidak terlepas dari penciptaan kondisi aman di tingkat nasional dan regional untuk dapat memberikan sumbangan terhadap pembangunan nasional. (Isbandi Andrianto, komunikasi personal, Januari 2017).”

Pada tingkat operasional keamanan maritim dipandang dalam kaitannya dengan ancaman. Pelbagai lembaga di Sumatera Barat dan Bengkulu memandang keamanan maritim sebagai suatu dinamika yang unik. Keterkaitan isu keamanan maritim dengan politik pemerintahan pusat sangat jelas terlihat pada lembaga di tingkat strategis, namun perbedaan dapat dilihat dari bagaimana pemikiran strategis tersebut dijalankan. Hal tersebut berdampak pada tugas yang di tingkat operasional cukup berbeda. Secara garis besar pemerintah daerah membutuhkan suatu strategi yang dapat menjadi panduan dalam menciptakan konsep keamanan maritim.

Pembahasan yang menarik dapat dilihat dari keunikan pandangan mengenai keamanan maritim pada tingkat operasional. Lembaga dengan wilayah kerja Sumatera Barat melihat potensi ancaman pada kawasan pariwisata. Selain itu terdapat potensi konflik vertikal antara masyarakat pesisir Sumatera Barat dengan pemerintah pusat setelah adanya larangan penggunaan kapal bagan di atas 30 gt, yang merupakan tradisi lokal yang telah berjalan lama. Juga ancaman konflik horizontal antara masyarakat dari wilayah berbeda dalam perebutan kawasan penangkapan ikan. Sedangkan di provinsi Bengkulu termasuk Pulau Enggano isu-isu seperti di atas tidak ditemui.

Meski keamanan maritim masih merupakan isu yang kabur dalam beberapa pandangan, namun terdapat benang merah yang dapat menjawab permasalahan tersebut. Masalah keamanan maritim memerlukan kajian yang komprehensif, setidaknya untuk terciptanya format keamanan maritim yang berbeda di setiap daerah. Berdasarkan UU no 23 tahun 2014 pasal 14 mengenai pembagian penyelenggaraan urusan pemerintahan, bidang kelautan, maka terdapat landasan legal dalam mengupayakan pengelolaan kemaritiman oleh pemerintahan daerah dengan kerjasama lintas sektor terutama sektor pertahanan dan keamanan yang berada pada tingkat daerah pula.

**Perubahan Sosial Melalui Konflik Kepentingan Maritim**

Keterkaitan antara perilaku pemerintah dan tindakan sosial dalam suatu pola interaksional dapat dikaitkan dengan adanya ‘konflik’ yang terjadi dalam interaksi tersebut. Konflik dipandang sebagai penyebab utama dalam perubahan sosial. Dahrendorf (*dalam* Lauer, 1993) menyatakan konflik kelas terjadi akibat merembesnya hubungan kekuasaan ke tingkat struktur sosial dan berdampak perubahan pada nilai-nilai atau pranata masyarakat (p. 282).

**Tabel 1. Tindakan Sosial Masyarakat**

|  |  |
| --- | --- |
| Tindakan Sosial | % |
| Tujuan | 40% |
| Nilai | 23% |
| Afektif | 20% |
| Tradisional | 16% |

**Tabel 2. Perilaku Pemerintah**

|  |  |
| --- | --- |
| Pencapaian Tujuan | % |
| Orientasi Internal | 37% |
| Penggunaan Instrumental | 23% |
| Kerjasama Lintas Sektor | 20% |
| Orientasi Ancaman | 20% |

|  |  |
| --- | --- |
| Adaptasi (Isu Tradisional) | % |
| Solusi Isu | 61% |
| Evaluasi Isu | 22% |
| Redefinisi Isu | 17% |
| penolakan isu | 0% |

|  |  |
| --- | --- |
| Integrasi | % |
| Lembaga lain sebagai subjek | 43% |
| Masyarakat sebagai objek | 30% |
| Masyarakat sebagai subjek | 20% |
| Lembaga lain sebagai objek | 7% |

|  |  |
| --- | --- |
| Pemeliharaan Pola | % |
| Menciptakan Inovasi | 39% |
| Kebutuhan Inovasi | 28% |
| Evaluasi Inovasi | 22% |
| Menolak Inovasi | 11% |

Berdasarkan analisis kuantitatif didapat hubungan searah positif antara peningkatan tindakan sosial masyarakat di dua lokasi penelitian. Dari tabel 1 diketahui bahwa tindakan sosial yang paling dominan adalah tindakan rasionalitas tujuan yang mencapai angka 40%, sedangkan pada tabel 2 diketahui perilaku pemerintah yang paling dominan yakni perilaku adaptasi dengan redefinisi isu, pencapaian tujuan melalui orientasi internal kelembagaan, dan pola integrasi memandang masyarakat sebagai objek.

Secara garis besar dapat digambarkan bahwa semakin besar keinginan pemerintah untuk menciptakan solusi suatu isu, berorientasi pada ancaman, dan orientasi tujuan kerjasama dan penggunaan instrumental maka akan semakin rendah tingkat tindakan sosial masyarakat berorientasi tujuan, namun sebaliknya akan memungkinkan memunculkan keinginan masyarakat untuk bertindak berdasarkan nilai dan dalam pola pemikiran yang berbasis keinginan di bawah alam sadar

Bila antar lembaga pertahanan, keamanan, dan pemerintahan daerah dianggap sebagai suatu struktur kekuasaan dan menjalankan proses konflik semu maka konflik dapat dipandang sebagai berikut:

*Konflik Antar Kekuasaan*

Secara makro dalam catatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2014), diketahui bahwa masyarakat Indonesia mengalami perubahan tindakan sosial yang cukup signifikan setelah era reformasi. Munculnya semangat sebagian masyarakat untuk membuang yang “serba lama” dan menggantikan dengan yang “serba baru.”. Bahkan lebih jauh ditinjau dari sisi ekonomi dan politik, menciptakan kegaduhan, konflik, dan benturan sosial disertai aksi-aksi kekerasan yang terjadi di mana-mana (p.17).

Sebagai dampak pasca reformasi 1998 tercipta otonomi daerah dan penghapusan dwi fungsi ABRI. Kehadiran awal otonomi daerah sendiri dipandang sebagai suatu upaya untuk menjamin keunikan bangsa Indonesia dengan keberagaman etnik seperti pada UU No 22 Tahun 1999 tentang “Pemerintahan Daerah” dan UU No 25 Tahun 1999 tentang “Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah”. Kemunculan UU tersebut menyangkut upaya perubahan format politik keseragaman budaya Indonesia yang dituangkan pada era orde baru menuju keberagaman (Tirtosudarmo, 2007, p. 16). Isu lain yang dihadapi adalah penghapusan dwifungsi ABRI sebagai upaya pembatasan tanggungjawab militer dan sipil. Pembatasan tersebut memacu terbentuknya *gap* antara TNI dan Polri, yang memunculkan konflik lain dalam upaya perebutan kekuasaan antar elit pemerintahan.

Dampak pembagian kekuasaan tersebut jelas terlihat di dua lokasi penelitian yaitu pemerintahan Sumatera Barat dan Bengkulu. Di kedua lokasi tersebut terlihat bahwa yang menjadi akselerator utama dalam perubahan adalah pemerintahan daerah sedangkan pemerintahan pusat merupakan pengatur ritme perubahan sebagaimana kebijakan nasional tercipta dan menjadi panduan daerah. Ketika pemerintahan daerah menjalankan pemerintahannya berdasarkan standar nasional yang berlaku maka perembesan kekuasaan nasional akan memiliki dampak yang signifikan dan berpengaruh pada perubahan di daerah.

*Konflik Kekuasaan Melibatkan Masyarakat*

Secara teoritis masyarakat dipandang sebagai unit lain dalam struktur sosial yang memiliki pengaruh dan terkena dampak dalam perubahan sosial. Dalam kasus konflik industri yang dijelaskan oleh Danrendorf (*dalam* Lauer, 1993, p. 282) yang terkena dampak utama dalam konflik kekuasaan adalah buruh sebagai organisasi majikan. Konflik antar majikan ini menyebabkan pula konflik pada organisasi buruh akibat adanya pengelompokan semu yang dilakukan oleh majikan.

Teoritis masyarakat Pulau Enggano dan Siberut yang berada pada Samudera Hindia mempunyai kesulitan akses menuju pembaharuan. Masyarakat di kedua pulau ini sering kali disebutkan sebagai masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai budaya dengan ciri khas etnik. terkandung dalam kearifan lokal.

Provinsi Bengkulu dan Sumatera Barat merupakan suatu daerah yang masih menyimpan banyak nilai-nilai adat yang kental. *Taabot* masih diselenggarakan tahunan oleh pemerintah provinsi Bengkulu. Kebudayaan Minang yang masih kental dengan orientasi tiga pemimpin kekuasaan antara adat, pemerintah, dan agama (filosofi *adak basanding sarak, sarak basanding kitabullah*). Bila masyarakat Pulau Siberut dan Enggano mengalami difusi budaya dengan masyarakat Bengkulu dan Sumatera Barat maka masih akan terdapat semangat kental dalam menjaga nilai-nilai luhur yang terkandung dalam masyarakat.

Di Pulau Siberut, dalam proses interaksional kekuasaan tidak terdapat konflik yang cukup kuat dalam upaya penciptaan inovasi sehingga perubahan fundamental tidak berjalan dengan baik di kawasan tersebut. Konflik horizontal tidak terjadi secara signifikan baik frontal maupun semu dan tidak ada keberpihakan pemerintah atau struktur sosial lainnya yang cukup kuat mempengaruhi pengorganisasian masa.

Munculnya perubahan pola tindakan sosial sebagai upaya perubahan sosial dari sisi distorsi kekuasaan akibat dampak konflik belum dapat menjadi jawaban yang signifikan. Ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi perubahan sosial yang terjadi seperti halnya benturan ekonomi dan teknologi yang menjadi akselerasi lain dalam perubahan sosial.

*Benturan Ekonomi*

Perubahan dapat terjadi pula tanpa adanya konflik. Dalam pidato Engels dikatakan bahwa aktivitas ekonomi sangat penting di mana manusia pertama kali harus makan, minum, mempunyai tempat tinggal dan pakaian, sebelum berpolitik, ilmu pengetahuan, seni, agama dan sebagainya (Jones, 2010, p. 77).

Konflik mulai terjadi ketika pendatang dengan motif ekonomi dan pembuangan persaingan urban datang ke wilayah yang terisolir tersebut. Program pemerintah yang paling berpengaruh adalah program transmigrasi. Konflik semu antara pendatang dan masyarakat lokal justru menyebabkan akulturasi nilai-nilai baru dalam masyarakat di pulau Enggano. Pada tingkat ini masyarakat mulai menyadari pentingnya penguatan ekonomi dan pendidikan sebagai bentuk awal dasar dari masyarakat post-modernis. Selanjutnya masyarakat Pulau Enggano berinteraksi lebih jauh dengan masyarakat di luar dalam upaya pendidikan dan aktivitas ekonomi yang menciptakan generasi transisi antara masyarakat dengan nilai-nilai lokal dan masyarakat post-modernis.

Di Pulau Siberut tidak dijalankan transmigrasi, sehingga dampak kekuasaan nasional tidak besar. Kedatangan pendatang di Pulau Siberut terjadi pula, namun konflik yang kental menyebabkan keterpisahan antara masyarakat asli dan pendatang. Masyarakat pendatang menempati posisi di kawasan pesisir, sedangkan masyarakat asli memilih tinggal terisolir di hutan dan dataran-dataran tinggi pulau. Masyarakat pendatang mengalami perubahan ekonomi yang cukup signifikan dengan adanya potensi alam Pulau Siberut. Pendapatan utama masyarakat pendatang terdapat pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan, serta jasa pariwisata. Keterpisahan masyarakat lokal dan pendatang baru dapat dihubungkan dengan adanya pengenalan pendidikan dan agama sebagai pemersatu. Perkembangan pariwisata yang berjalan cepat menghadirkan masyarakat global ke Pulau Siberut yang selanjutnya masyarakat global tersebut lebih memihak pada warga lokal sehingga perubahan sosial pada masyarakat lokal banyak dipengaruhi pada instrumen nilai berbasis ide dibandingkan materil.

*Benturan Teknologi*

Secara teoritis perubahan sosial juga dapat terjadi akibat perkembangan teknologi dalam 3 cara. Mesthene (1968 *dalam Lauer*, 1993) menyatakan bahwa teknologi dapat meningkatkan alternatif-alternatif peluang, dengan kata lain teknologi membawa cita-cita yang sebelumnya tak dapat dicapai ke dalam alam kemungkinan dan dapat mengubah kesukaran relatif atau memudahkan menyadari nilai-nilai yang berbeda (p. 220). Cara lainnya adalah ketika teknologi mempengaruhi perubahan dengan mengubah pola-pola interaksi (p. 221). Cara terakhir adalah melalui munculnya masalah sosial baru sebagai dampak terduga maupun tak terduga dari penerimaan inovasi teknologi (p. 223-224).

Perkembangan teknologi alat tangkap di Pulau Siberut tidak begitu berbeda dengan alat tangkap di Pulau Enggano. Dari segi ukuran dan kapasitas tangkapan, nelayan Pulau Siberut lebih unggul dibandingkan dengan Pulau Enggano. Untuk mengupayakan alat tangkap dan kapalnya, nelayan Pulau Siberut memanfaatkan sumberdaya di sekitarnya. Penggunaan jaring lingkar dan pancing rawai masih menjadi pilihan utama didukung beberapa toko yang menyediakannya.

Teknologi yang dikonsumsi oleh masyarakat, juga didominasi oleh kendaraan bermotor dan komunikasi. Kemunculan teknologi justru mengantarkan kepada masalah sosial baru, di mana kebutuhan akan energi (listrik dan bbm) mengalami peningkatan serius, dan masyarakat mengalami ketergantungan total.

Dampaknya adalah peningkatan kebutuhan dan perlunya tambahan pendapatan. Ini pada dasarnya mengakselerasi masyarakat untuk berinovasi dan menciptakan kreatifitas. Namun keterbatasan ide menyebabkan masyarakat memikirkan jalan lain. Maka proses-proses illegal dan curang sangat rentan terjadi, sebagai contoh meningkatnya upaya penangkapan ikan tak ramah lingkungan (penggunaan bom, racun, dan pukat harimau), dan penyelundupan minyak, barang, dan narkoba. Seperti yang dijelaskan oleh Polair Polda Sumbar dengan angka kejadian Illegal fishing antara tahun 2011-2015 mencapai angka 31 kasus (Mulyadi, Komunikasi personal, November 2016).

**Strategi Kebijakan Keamanan Maritim Berbasis Perubahan Sosial**

Siklus perubahan sosial dapat dijadikan bahan untuk analisis lebih lanjut dalam kaitan untuk pengambilan keputusan. Perubahan sosial dianggap sebagai faktor internal dalam formulasi. Untuk mencapai model ideal kebijakan kemaritiman dengan melibatkan masyarakat dalam keamanan maritim melalui pendekatan SSM, setidaknya dapat disusun poin-poin kebijakan sebagai berikut:

1. Tata kelola pemerintahan berbasis Maritim. Kebijakan ini merupakan kunci awal dalam proses penetapan model keamanan maritim. Sebagaimana kebijakan ini merupakan inti dari kebijakan *maritime security sector reform,* dan belum menjadi pemikiran mendasar dalam program Poros Maritim Dunia, namun kebijakan ini dapat dijalankan melalui program revolusi mental yang khusus dijalankan pada tingkatan birokrasi pemerintahan. Seperti halnya yang dijalankan oleh pemerintah provinsi Bengkulu dengan mengharapkan reformasi birokrasi dapat dijadikan alat untuk penyebarluasan proses perubahan sosial dari elitis pemerintah ke masyarakat.
2. Fokus pengembangan ekonomi maritim. Proses pengembangan ekonomi maritim selain melihat kondisi geografis dan potensi sumberdaya alam, juga merupakan kewajiban yang tertuang dalam aturan hukum laut internasional di mana negara dengan sumberdaya laut yang tinggi namun tidak dapat mengelolanya harus memberikan kesempatan kepada negara lain untuk ikut andil dalam mengeksploitasi sumberdaya lautnya. Bila kebijakan ini tidak dijalankan dengan fokus akan memiliki dampak besar di kemudian hari.
3. Pertahanan dan keamanan maritim melalaui otoritas sipil, Undang-undang dasar telah banyak memberikan petunjuk untuk dapat melibatkan masyarakat dalam suatu upaya menjaga kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan negara. Program ‘belanegara’ yang telah dijalankan oleh kementerian pertahanan harus dapat dikembangkan secara lebih masif dan terukur sebagaimana bentuk ancaman yang tak dapat diprediksi.
4. Pengembangan budaya maritim melalui diplomasi. Era globalisasi yang mengaburkan batasan antar negara, bukan menjadi hambatan untuk proses penanaman budaya maritim di lingkup nasional. Mengenalkan budaya maritim secara internasional diharapkan menjadi pola label yang diakui dunia internasional dan tercermin ke masyarakat nasional yang telah memiliki komunitas maya internasional sendiri. Peran teknologi informasi harus dapat dimanfaatkan oleh lembaga negara secara maksimal. Menciptakan sarana dan prasarananya merupakan alat utama propaganda dan penggalangan dalam proses kontrol krisis identitas nasional.

**Kesimpulan**

Pelibatan masyarakat dalam keamanan selama ini mengalami kesulitan dalam meredefinisi strategi. Kegiatan pelibatan masyarakat yang diselegarakan oleh lembaga pertahanan (TNI) mengikuti format nasional namun tidak adaptif untuk karakteristik daerah yang memiliki keberagaman. Lembaga keamanan (POLRI) menjalan kebijakan pelibatan keamanan sesuai dengan kebijakan politis daerah namun tidak dapat diukur tingkat keberhasilannya secara nasional.

Dinamika keamanan maritim di dua lokasi penelitian sangat berbeda tergantung pada faktor ancaman. Untuk lembaga yang mengikuti standar nasional sering kali terjadi pertentangan kebijakan dan kearifan lokal daerah. Diperlukan kebijakan keamanan maritim yang sesuai dengan format ancaman daerah yang dirumuskan secara bersama-sama oleh unsur pimpinan musyawarah daerah. Peran nasional berada pada penujukkan aktor dan *leading sector* dalam kebijakan keamanan maritim yang dapat diadopsi pemerintah daerah.

Tindakan masyarakat pesisir Pulau Enggano dan Siberut bukanlah tindakan yang ideal untuk masyarakat yang berada pada kondisi tertinggal dan terpencil, hal tersebut mengisyarakatkan bahwa semangat perubahan telah sampai kepada titik terkecil masyarakat Indonesia. Gambaran tersebut juga menjelaskan bahwa pemerintah telah menjadi pengaruh paling dominan dalam proses perubahan sosial di masyarakat Indonesia pasca promosi otonomi daerah.

Perembesan konflik kekuasaan lokal terjadi penuh di Pulau Enggano, sedangkan di Pulau Siberut hanya menonton konflik nasional dikarenakan pemerintahannya yang relatif konservatif menjaga nilai-nilai adat. Namun demikian, kebutuhan ekonomi dan benturan teknologi sebagai faktor lain dalam perubahan mempengaruhi pergerakan masyarakat di kedua pulau. Dari hasil perubahan tindakan sosial masyarakat dapat diketahui bahwa perubahan lebih cenderung kecil di Pulau Siberut dibandingkan Pulau Enggano.

Melalui gambaran perubahan sosial di kedua lokasi penelitian dapat disusun pendekatan model keamanan maritim yang paling ideal sebagai berikut: (1) Tata kelola pemerintahan berbasis maritim; (2) Fokus pengembangan ekonomi maritim; (3) Pertahanan dan keamanan melalui otoritas Sipil; (4) Pengembangan budaya maritim melalui diplomasi.

**Daftar Pustaka**

**Buku**

Creswell, J.W. (2014). *Research Design; Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Jones, P. (2009). *Pengantar Teori-Teori Sosial dari Fungsionalisme hingga Post-moderinisme*, Yayasan pustaka obor Jakarta, Jakarta.

Lauer, R. H. (1993). *Perspektif Tentang Perubahan Sosial.* PT Rineka Cipta, Jakarta.

Limbong, B. (2015). *Poros Maritim.* Margareta Pustaka, Jakarta.

Rahman, C (2009).*Concepts of Maritime Security A strategic perspective on alternative visions for good order and security at sea, with policy implications for New Zealand*. The Centre for Strategic Studies: Victoria University of Wellington. New Zealand.

Till, G (2004), *Seapower A Guide for the Twenty-First Century – 2nd*. Routledge. New York.

Tirtosudarmo, R (2007), *Mencari Indonesia Demografi-Politik Pasca-Soeharto*. LIPI Press Bekerjasama dengan Yayasan Obor Indonesi, Jakarta.

Williams, B & Hummelbrunner, R (2011), *Systems concepts in action: a practitioner’s toolkit*. Stanford University Press, California

Yudhoyono, S. B. (2014). *Selalu Ada Pilihan untuk Pencinta Demokrasi dan Para Pemimpin Indonesia Mendatang*. Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

**Makalah Seminar, Konferensi, dan Sejenisnya**

Djalal, H. (2016). *Tantangan Indonesia Dalam Menuju Poros Maritim Dunia.* Naskah Kuliah Hukum Laut dan Perjanjian Internasional pada 26 Mei 2016.

Suropati, Untung (2016). *Global Maritime Nexus: Indonesia’s 21st Century Maritime Vision*. Naskah Kuliah Umum di LEMHANNAS pada tanggal 19 Mei 2016.

**Dokumen Lembaga**

TNP2K, (2011), *Pendataan rumah tangga miskin di wilayah pesisir/nelayan*. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

KKP, (2016), Rencana Strategis Kementerian Kelautan Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 45/Permen-Kp/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/Permen-Kp/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2015-2019.

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

**Internet**

http://bbc.com, 2016, pA160531, diakses pada 19 Januari 2016 pukul 03.40 WIB.http://ekonomi.metrotvnews.com diakses pada 12 Juli 2016 pukul 22.15 WIB.

1. Mukti Aprian, S.Kel., M.Si (Han). Alumnus Mahasiswa Strata -2 Program Studi Keamanan Maritim Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan Tahun Akademik 2015-2016. [↑](#footnote-ref-1)